



REPUBLIK INDONESIA



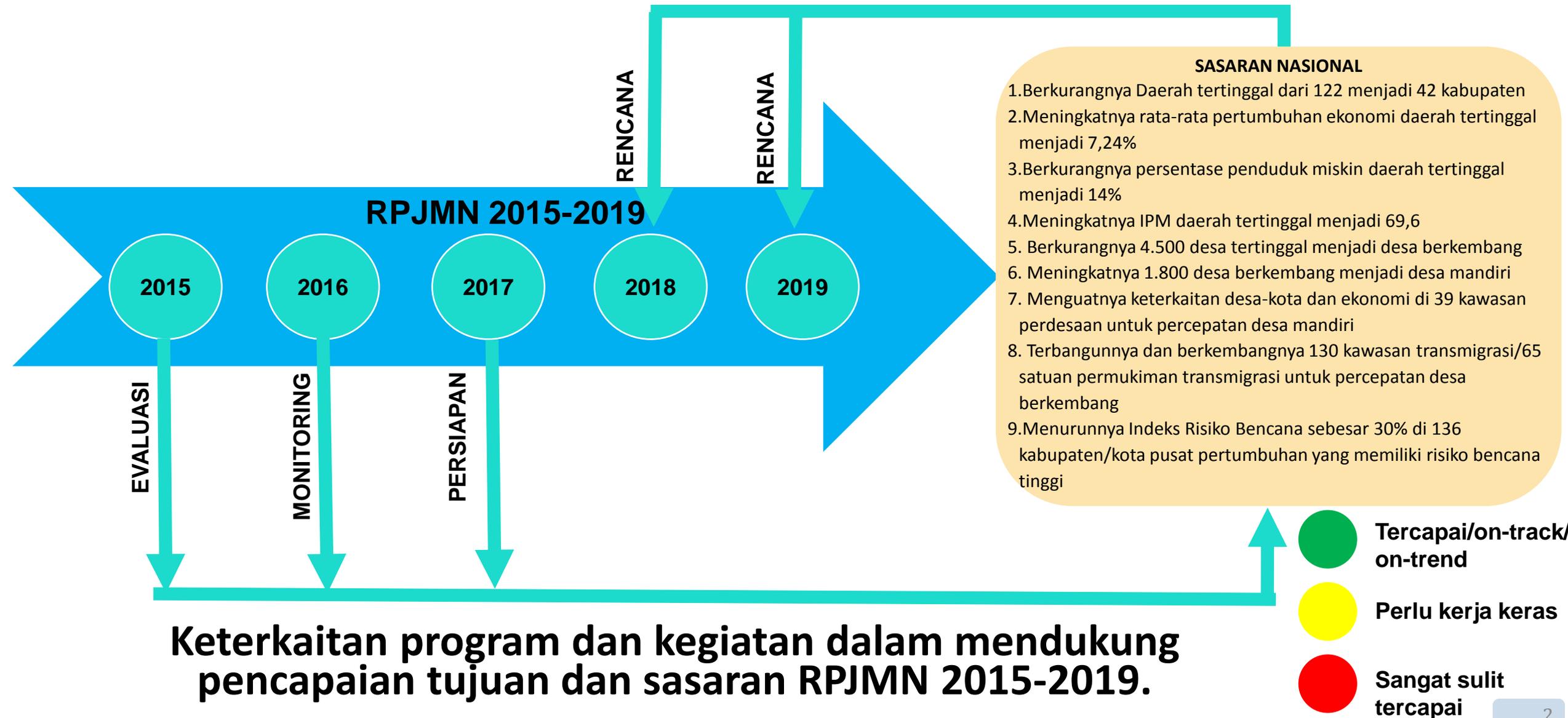
Kementerian PPN/
Bappenas

Highlight Penekanan Sasaran dan Lokasi (Daerah) **dalam RKP 2018** **PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH**



KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
13 JANUARI 2017





SASARAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH TAHUN 2018

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & KAWASAN PERBATASAN						
Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)	6.89	6.96	7.02	7.08	7.15	7.24
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	16.42	16	15.42	14.9	14.43	14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	67.46	68.13	68.49	68.84	69.18	69.59
Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan	3 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN
Pembangunan Kecamatan lokpri kawasan perbatasan	111 lokpri	50 lokpri	100 lokpri	150 lokpri	187 lokpri	187 lokpri
Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN)	--	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN
SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN						
Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	--	500 desa	1.500 desa	3.000 desa	4.500 desa	5.000 desa
Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri	--	200 desa	600 desa	1.200 desa	1.800 desa	2.000 desa
Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri	--	14 Kaw		28 Kaw	39 Kaw	39 Kaw
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang		14 Kaw/ 7 SP	43 Kaw/ 22 SP	86 Kaw/ 43 SP	130 Kaw/ 65 SP	144 Kaw/ 72 SP
SASARAN REFORMA AGRARIA						
Pengukuran dan Pemetaan Dasar	14.960.000	14.985.000	5.690.000	330.000	12.670.000	18.100.000
Sertipikat Prona		877.777	922.155	2.513.702	7.646.605	7.726.555
Sertipikat Redistribusi TORA	--	92.274	66.973	23.925	23.925	23.925
Sertipikat Konsolidasi Tanah		1.850	11.500	2.170	2.520	2.680
SASARAN PENURUNAN IRBI						
Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional	156.3	151.6	146.9	142.2	137.5	132.8
Rata-rata IRBI 136 Kabupaten/Kota sasaran prioritas nasional	169.4	164.3	159.2	154.1	149	144

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
	(Baseline)				
SASARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA					
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua*		7,97	8,9-9,3	15,1	7,16
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat*		4,1	4,9-5,3	14	7,3
Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua*		28,17	28,44	26,1	26,82
Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Barat*		25,73	28,40	21,4	22,44
Tingkat Pengangguran Provinsi Papua*		3,99	3,94	3,12	3,6
Tingkat Pengangguran Provinsi Papua Barat*		5,1	4,8	4,6	
IPM Provinsi Papua***		57,25	57,85	58,45	59,05
IPM Provinsi Papua Barat***		61,73	62,16	62,60	63,03
Konektivitas Provinsi Papua***		0,02	0,02	0,03	0,03
Konektivitas Provinsi Papua Barat***		0,07	0,08	0,08	0,09
Rasio Elektrifikasi Provinsi Papua**		52,36	61,02	69,46	77,7
Rasio Elektrifikasi Provinsi Papua Barat**		81,81	85,56	89,09	92,42

*) RPJMN 2015-2019
2016 data TW III BPS
Sasaran 2017 : Target RKP 2017 (Perpres 45 th 2016)

**)<http://www.djk.esdm.go.id/pdf/Renstra/Renstra%202015-2019.pdf>

***) perhitungan proyeksi sementara

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN

Sasaran	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Ralisasi	Target	Ralisasi		
Jumlah Daerah Tertinggal	Kabupaten	122 (termasuk 9 DOB)	*)	-	*)	-	42	●
Kabupaten terentaskan	Kabupaten	-	*)	-	*)	-	80	●
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	persen	7,10	6.96	6.55	7.02	Belum tersedia data	7.24	●
Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	(%)	16.64	16.00	18.77	15.42	Belum tersedia data	14.00	●
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal		68.46	68.13**	59.87***	68.49**	Belum tersedia data	69.59**	Tidak dapat diperbandingkan
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	PKSN	3	-	2	10	9	10	●
	PLBN	-	-	-	7	7	7	●
	Lokpri Kecamatan	111	50	50	100	78	150	●
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	Pulau-Pulau Kecil Terluar	12	10	10	30	20	32	●

Terdapat perubahan asumsi dasar makro & tahun dasar

Terdapat penyesuaian data dengan nasional

Terdapat perubahan metode perhitungan

REVISI TARGET

*) Berdasarkan PP 78/2014, **penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali**, sehingga target jumlah daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun

***) Menggunakan perhitungan IPM **metode lama** sesuai *baseline* dan target dalam RPJMN 2015-2019.

****) Menggunakan perhitungan IPM **metode baru**.

7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw)

10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)

● On track/on trend/ tercapai

● Perlu kerja keras

● Sangat sulit tercapai

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Sasaran	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa	desa	20.432 *)	500	N/A**)	1.000	N/A**)	5.000	
2. meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	desa	50.763 *)	400	N/A**)	400	N/A**)	2.000	
3. menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa	pusat pertumbuhan	-	***)	***)	14	14	39	
4. membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang	kawasan transmigrasi	619	14	37	43	54	144	

*) Jumlah desa tertinggal dan berkembang (pada tahun baseline 2014) sebagaimana tertuang dalam Indeks Pembangunan Desa.

***) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi mengingat data yang diperlukan menggunakan data Potensi Desa yang dikeluarkan BPS setiap 3 tahun sekali.

***) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi karena pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan baru disahkan pada awal tahun 2016 dan menjelang akhir tahun 2016 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang menyelesaikan 14 dokumen masterplan pengembangan kawasan perdesaan.



On track/on trend/ tercapai



Perlu kerja keras



Sangat sulit tercapai

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Sasaran	Satuan	2014	2015		2016		Target 2018*	Target 2019*	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		(baseline)	Target *	Realisasi	Target*	Realisasi			
Mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional	%	156.3	151.6	**)	146.9	Belum tersedia data	137.5	132.8	
Mengurangi Indeks Risiko Bencana di 136 Kab/Kota Sasaran Prioritas Nasional	%	169.4	164.3	**)	159.2	Belum tersedia data	149.0	144	

Keterangan

On track/on trend/tercapai



Perlu kerja keras



Sangat sulit tercapai



*) Target Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30% sampai dengan 2019 dengan melakukan peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota

***) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi karena perhitungan Indeks Risiko Bencana baru dilakukan pada awal tahun 2016 dan membutuhkan monitoring evaluasi penilaian kapasitas perangkat daerah dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari 71 Indikator sebagai metode pengukuran

Capaian Sasaran Reforma Agraria Tahun 2015-2019

Sasaran	Satuan	2014 (Baseline)	2015		2016		Target 2018	Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Meningkatkan cakupan peta dasar pertanahan	Hektar	14,96 juta	14.985.000	14.985.000	6.520.000	5.690.000	12.670.000	13.400.000	1
Penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian ATR/BPN	Km	-	0	0	0	0	0	189.056,6	3
Melaksanakan redistribusi tanah	Bidang		107.150	92.274	175.000	66.973	23.925	4.500.000	3
Meningkatkan cakupan bidang tanah bersertipikat	Bidang		928.635	877.777	1.068.485	922.155	7.646.605	7.115.765	1
Inventarisasi P4T	Hektar		144.900	69.721	2.464.400	2.464.400	120.445	10.000.000	3
Konsolidasi Tanah	Bidang		12.000	1.850	11.500	11.500	2.520	57.500	2
Proporsi juru ukur secara nasional	Orang	3.013	150	0	150	0	1.500	10.000	3

Keterangan On track/on trend/

tercapai

1

Perlu kerja

keras

2

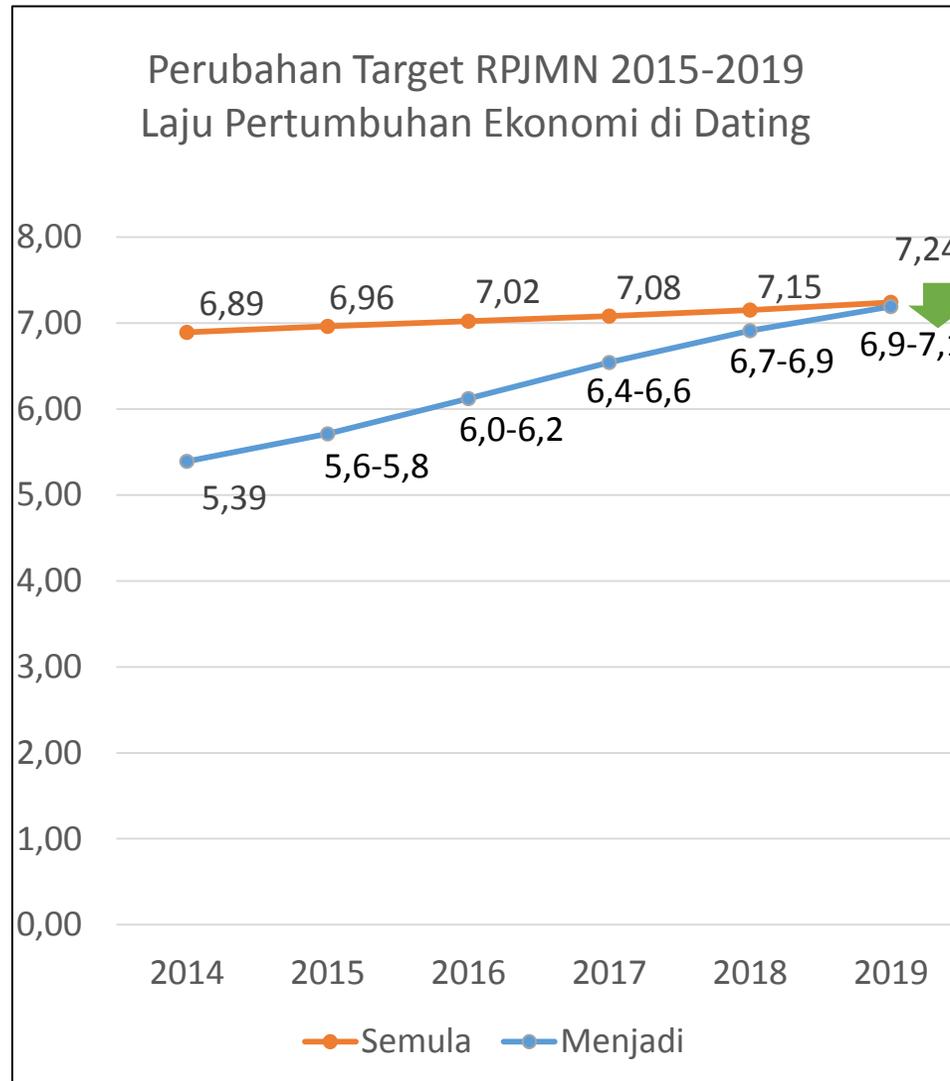
Sangat sulit

tercapai

3

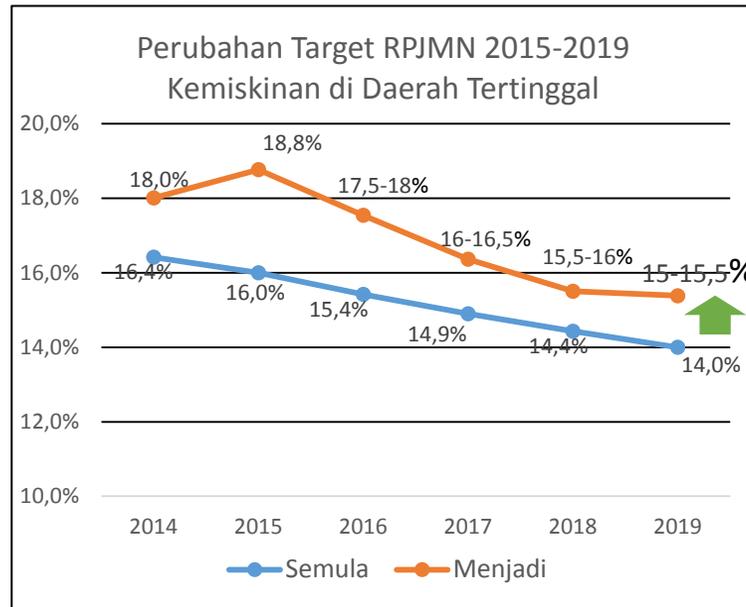
Sumber: Kementerian ATR/BPN (2016, diolah)

PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015-2019 (1/2)



- Terdapat perubahan asumsi dasar makro → Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 5,1 persen
- Terdapat perubahan tahun dasar → tahun 2000 menjadi 2010
- Mempertimbangkan capaian tahun 2015 = sebesar 6,55% (sumber: Tinjauan Regional PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015, BPS), maka ditargetkan perekonomian daerah tertinggal dapat tumbuh rata-rata 6,3% per tahun & ditargetkan tahun 2019 sebesar 6,9-7,1%
- Perlu adanya *treatment* khusus pada daerah tertinggal yang mengalami kontraksi perekonomian tinggi seperti di Kalimantan, Papua dan juga daerah tertinggal dengan PDRB yang rendah

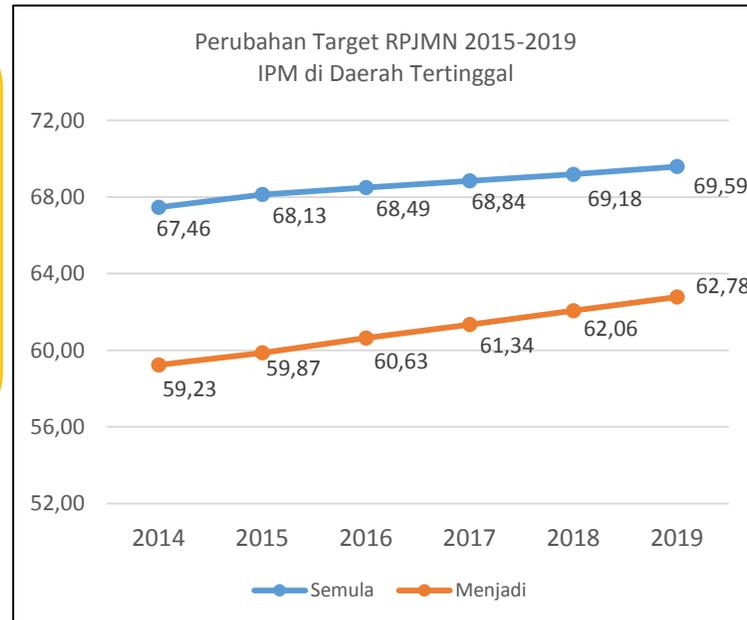
- Terdapat penyesuaian data kemiskinan tahun dasar dengan data nasional (sumber data: Data & Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, BPS)
- Sejalan dengan kondisi nasional, pada tahun 2015 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
- Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih fokus pada daerah tertinggal yang menghadapi tingkat kemiskinan tinggi (>target RKP 2018 10%) dan pengangguran yang tinggi (>target RKP 2018 5,5%)



No	Wilayah	Kabupaten	Kemiskinan 2015 >10%	Penangguran 2015 >5,5%
1	Sumatera	Aceh Singkil	21,72	7,03
2	Jawa	Pandeglang	10,43	10,22
3	Nusra	Lombok Tengah	16,26	7,42
4	Nusra	Lombok Timur	19,14	6,46
5	Nusra	Dompu	15,11	5,56
6	Nusra	Sumbawa Barat	16,97	7,98
7	Kalimantan	Landak	13,51	5,81
8	Sulawesi	Sigi	12,75	5,74
9	Sulawesi	Konawe	16,09	10,70
10	Sulawesi	Gorontalo Utara	18,93	5,61
11	Kep Maluku	Maluku Tengah	22,1	12,75

No	Wilayah	Kabupaten	Kemiskinan 2015 >10%	Penangguran 2015 >5,5%
12	Kep Maluku	Seram Bagian Barat	26,35	8,21
13	Kep Maluku	Seram Bagian Timur	25,37	6,18
14	Kep Maluku	Buru Selatan	17,58	9,14
15	Papua	Teluk Bintuni	36,66	6,87
16	Papua	Sorong	33,35	5,66
17	Papua	Raja Ampat	20,94	5,59
18	Papua	Merauke	11,1	9,08
19	Papua	Nabire	24,37	10,14
20	Papua	Biak Numfor	27,23	10,08
21	Papua	Supiori	39,25	10,75
22	Papua	Deiyai	45,74	5,64

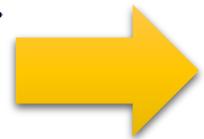
- Terdapat perbedaan metode perhitungan IPM
- Target dihitung berdasarkan data back casting IPM per kabupaten dengan metode baru periode 2010-2015 (sumber data: <http://ipm.bps.go.id/data/nasional>)
- Strategi peningkatan IPM difokuskan pada kabupaten dating dengan IPM rendah (<rata2 59,87) dengan laju rata-rata kenaikan IPM 2010-2014 yang rendah (<rata2 1,3% atau dibawah 2 point) → sesuai dengan capaian aspek pembentuk IPM yang rendah



No	Pulau	Kab/Kota	IPM	Rata-rata Laju Kenaikan IPM 2010-2015
1	Sumatera	Nias Barat	58,25	1,25%
2	Sumatera	Kepulauan Mentawai	57,41	0,62%
3	Nusa Tenggara	Alor	58,50	1,08%
4	Nusa Tenggara	Rote Nda	58,32	1,26%
5	Nusa Tenggara	Sumba Barat Daya	57,91	0,56%
6	Nusa Tenggara	Manggarai Timur	56,83	0,93%
7	Nusa Tenggara	Malaka	57,51	1,21%
8	Maluku	Maluku Barat Daya	58,64	1,01%
9	Maluku	Pulau Morotai	59,27	1,15%
10	Maluku	Pulau Taliabu	58,26	1,23%
11	Papua	Maybrat	55,78	1,15%
12	Papua	Paniai	54,20	0,62%
13	Papua	Boven Digoel	59,02	1,01%
14	Papua	Mappi	56,11	0,74%
15	Papua	Lanny Jaya	44,18	1,27%
16	Papua	Deiyai	48,28	1,15%

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN (1/2)

Profil Kemiskinan di Indonesia 2016:
Dalam Angka Berkurang, Namun di
Desa Makin Dalam dan Parah



**DALAM 187 KEC. LOKPRI TERDAPAT 1.734
DESA/KELURAHAN**

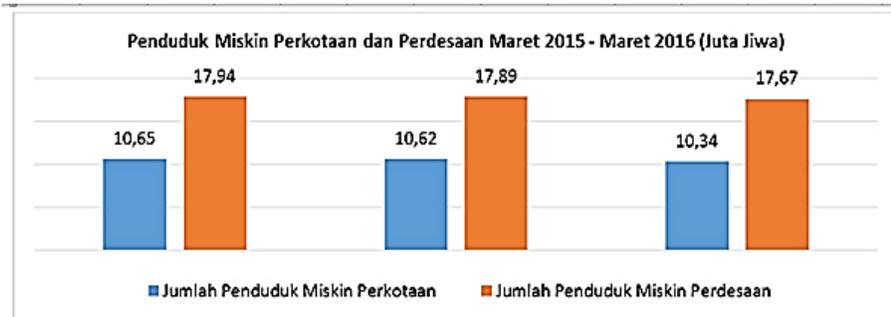


Data Proyeksi Sementara Biro PKH



**KEMISKINAN ABSOLUT
BERADA PADA 140
KEC.LOKPRI**

**KEMISKINAN RELATIF
BERADA PADA 47
KEC.LOKPRI**



Sumber: BPS, diolah SPI

**INDEKS KEMANDIRIAN 187
KEC.LOKPRI PERBATASAN NEGARA
TAHUN 2016**

Indeks Kemandirian 187 Kec.Lokpri berada dalam rentang 0,00 – 1,00, dengan kategori indeks:

Tinggi : 0,81 – 1,00
Sedang : 0,61 – 0,80
Rendah : 0,41 – 0,60 (47 KEC.LOKPRI)
Sangat Rendah : 0,00 – 0,40 (140 KEC.LOKPRI)

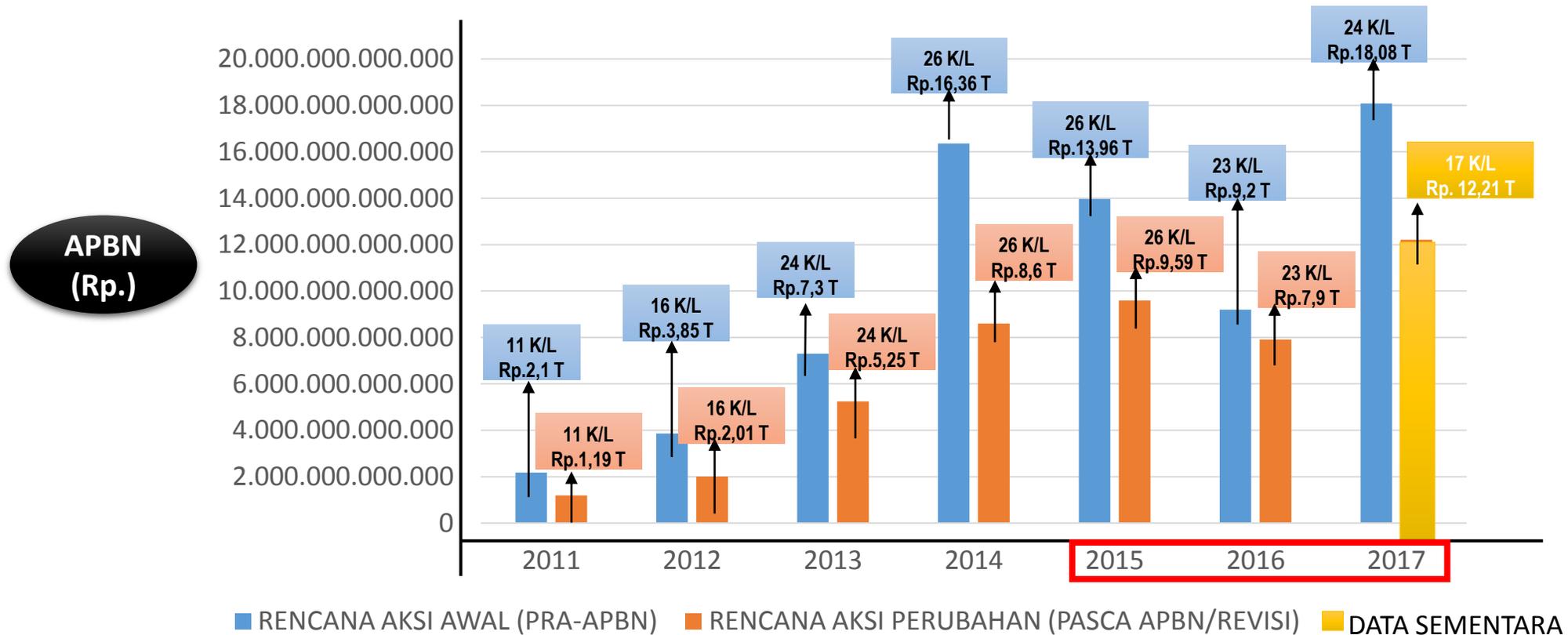
**GINI RASIO (KETIMPANGAN WIL./
KESENJANGAN EKONOMI 187
KEC.LOKPRI PERBATASAN NEGARA
TAHUN 2016**

Gini Ratio 187 Kec.Lokpri berada dalam rentang 0,00 – 1,00, dengan kategori ratio:

Tinggi : 0,51 – 1,00 (140 KEC.LOKPRI)
Sedang : 0,31 – 0,50 (47 KEC.LOKPRI)
Rendah : 0,00 – 0,30

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN (2/2)

REVIU LAPORAN RENAKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN TAHUN 2015 – 2016 (SAMPAI DENGAN TGL.21 NOV. 2016)



Jml. Anggaran Renaksi Awal Th.2015 s.d 2017 (RPJMN Ke-3) :

Rp. 41,25 Triliun

Rencana Target (2015-2017) : 150 Kec.Lokpri dan 10 PKSN

Jml. Anggaran Renaksi Awal Th.2015 s.d 2016 :

Rp. 23,16 Triliun

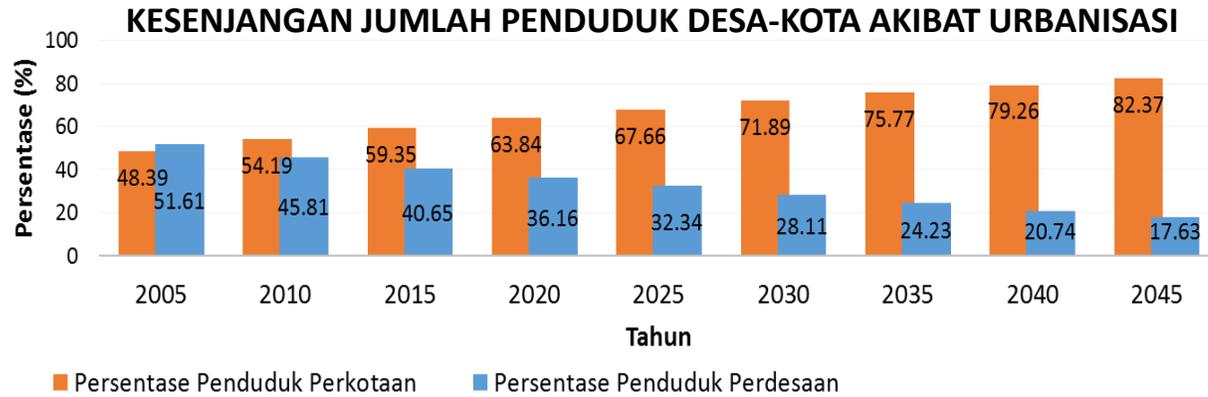
Rencana Target (2015-2016) : 100 Kec.Lokpri dan 10 PKSN

Jml. Realisasi Anggaran Renaksi Th.2015 s.d 2016 :

Rp. 17,50 Triliun

Realisasi Target (2015-2016) : 78 Kec.Lokpri dan 3 PKSN

PEMBANGUNAN PERDESAAN

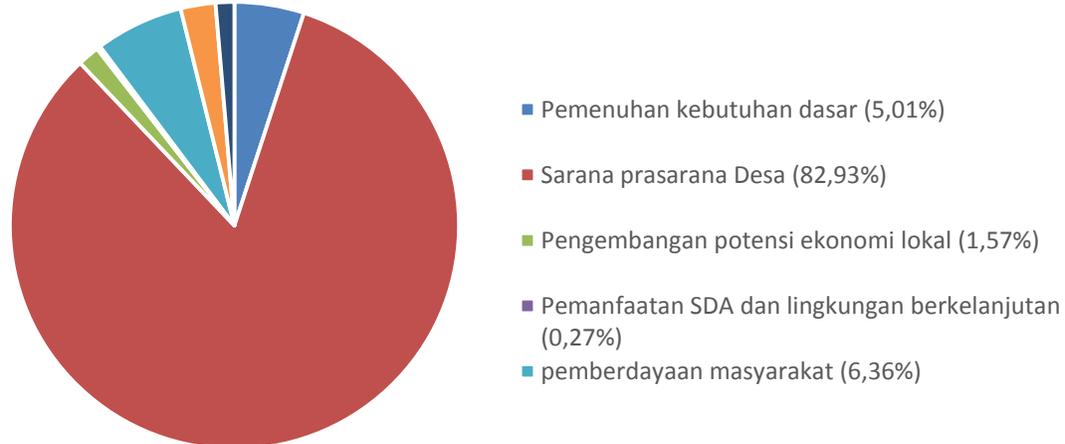


Tingkat pertumbuhan penduduk di **perkotaan 2,75%** pertahun, **nasional** hanya **1,17%** per tahun

2015: 59,35% penduduk sudah hidup di perkotaan

2045: 82,37% penduduk akan hidup di perkotaan!

PEMANFAATAN DANA DESA PER DESEMBER 2016

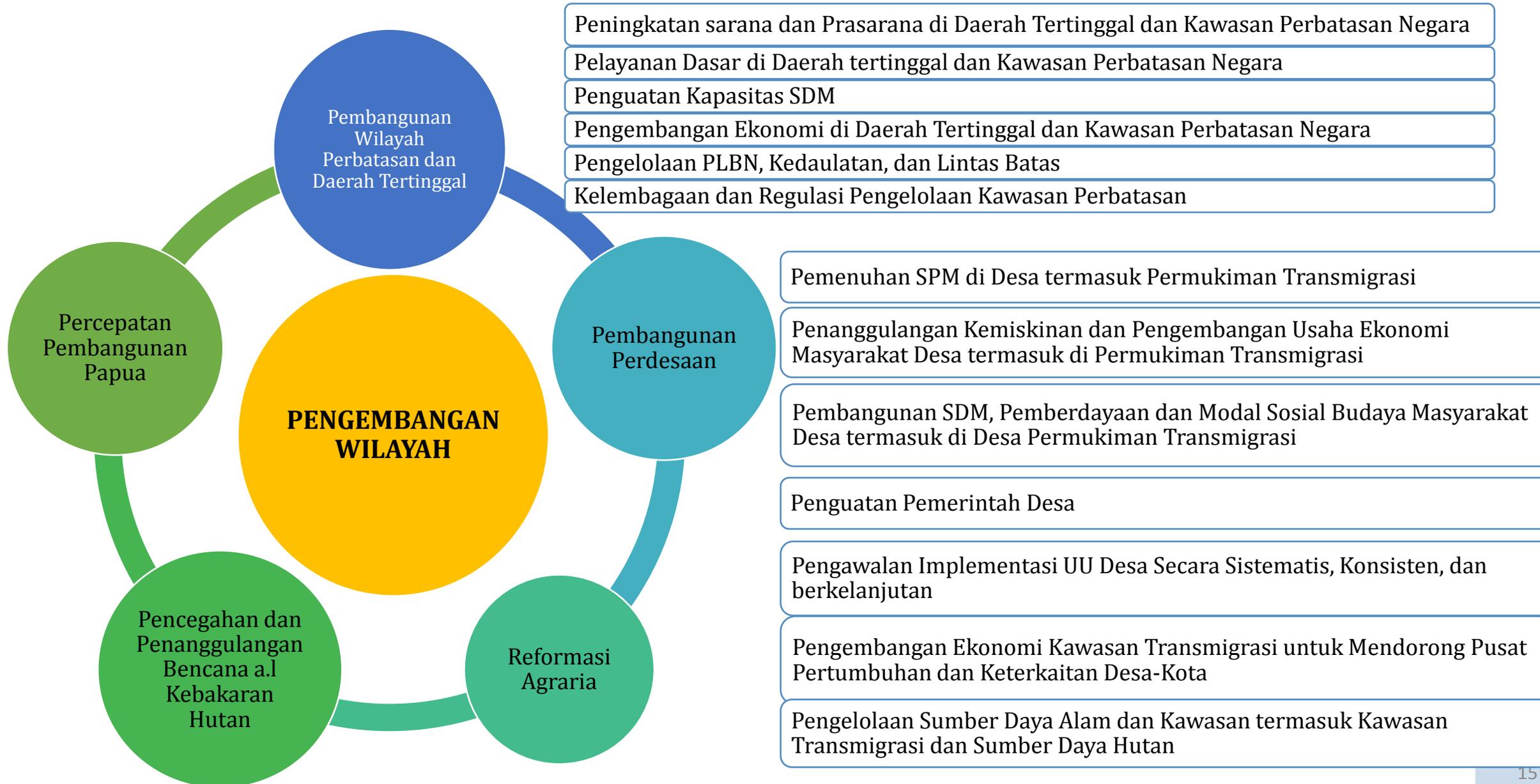


* Berdasarkan laporan pemanfaatan 29,736 T dari 42,047 T yang tersalurkan ke RKUDes

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PERDESAAN



ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (1)



- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
 - Pengembangan konektivitas wilayah
 - Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal & strategis dan pariwisata
 - Perlindungan sosial
 - Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat
-
- Pemberdayaan Masyarakat
 - Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
 - Sarana dan Prasarana Kebencanaan
 - Pelayanan Dasar
 - Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana
 - Penguatan Kelembagaan dan Regulasi



RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara	Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara	Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan	Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih	Distribusi tenaga pendidik	Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN	Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Pembangunan dermaga	Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru	Distribusi tenaga kesehatan	Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif	Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah	Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan
Pembangunan dan rehabilitasi bandara	Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda	Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen	Penyelesaian Segmen Batas	Kerjasama Multilateral
Pelayanan angkutan keperintisan	Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu	Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha	Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM	Pengelolaan Kawasan Maritim	Regulasi Ekspor Import
Penyediaan Akses Telekomunikasi	Pengadaan alat kesehatan		Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan	Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan
Penyediaan Moda Transportasi	Penyediaan akses ketenagalistrikan		Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha	Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu	Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Penyediaan akses ketenagalistrikan					Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara					

Urusan Wajib dan Kewenangan Pemerintah Pusat

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	Penguatan Pemerintahan Desa	Pengawasan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan	Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)	Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan	Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa	Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana	Penataan Kawasan Sentra Nelayan	Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan
Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan terutama UMKM	Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi	Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa		Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah	Penguatan Permodalan dan Akses Pasar	Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa		Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama	Penataan dan Perencanaan Kawasan
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi dan Evaluasi Perkembangan Desa		Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan
		Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa			Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan

PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA

Kegiatan Prioritas

Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

Proyek Prioritas

Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria

Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis

Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat

Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria

Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis

Kegiatan Prioritas

Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

Proyek Prioritas

Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria

Identifikasi Kawasan Hutan yang akan Dilepaskan

Identifikasi dan Redistribusi HGU habis dan tanah terlantar

Identifikasi tanah milik untuk legalisasi aset masyarakat miskin

Identifikasi dan pengembangan kelembagaan subyek penerima manfaat reforma agraria

Kegiatan Prioritas

Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria

Proyek Prioritas

Perbaiki proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di Kab/Kota

Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan

Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin

Publikasi tata batas kawasan hutan

Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi

Legalisasi untuk tanah transmigrasi

Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat

Kegiatan Prioritas

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA

Proyek Prioritas

Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA

Penyediaan, dan pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan

Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha

Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA

Interkoneksi dengan dunia usaha dan pemasaran hasil produksi

Sekolah lapang petani subyek penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah dan produksi

Kegiatan Prioritas

Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Proyek Prioritas

Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA

Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat

Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah

Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Prioritas

Pemberdayaan Masyarakat

Proyek Prioritas

Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi

Kegiatan Prioritas

Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana

Proyek Prioritas

Sosialisasi dan Simulasi Bencana
Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana

Kegiatan Prioritas

Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Proyek Prioritas

Penyediaan Sistem Peringatan dini
Pembangunan pusat logistik kebencanaan
Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana
Pengembangan teknologi kebencanaan

Kegiatan Prioritas

Pelayanan Dasar Kebencanaan

Proyek Prioritas

Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana
Penyediaan layanan data dan informasi bencana

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana

Proyek Prioritas

Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana

Kegiatan Prioritas

Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan

Proyek Prioritas

Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan
Rehabilitasi pesisir
Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan
Rehabilitasi DAS

Kegiatan Prioritas

Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Proyek Prioritas

Penyusunan kajian dan peta risiko
Penguatan koordinasi penanggulangan bencana
Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Proyek Prioritas

Penerapan kurikulum kontekstual papua menuju kurikulum nasional

Pengembangan sekolah berbakat

Peningkatan kompetensi guru

Jaminan kesejahteraan bagi guru

Pengadaan dan redistribusi guru dan sukarelawan (termasuk SM3T dan GGD)

Penguatan sistem manajemen pengawasan pendidikan

Penyediaan tempat tinggal guru di sekitar sekolah

Pembangunan sekolah berasrama (termasuk penyediaan tempat tinggal guru) SD, SMP, dan SMA di wilayah pegunungan tengah/daerah sulit secara geografis

Penyediaan sarana pembelajaran : buku ajar, peralatan laboratorium, perpustakaan.

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Proyek Prioritas

Pembangunan & Pengembangan RS Rujukan, RS Pratama, & RS Pendidikan serta Revitalisasi Puskesmas

Penurunan Kematian Ibu, bayi dan anak

Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS

Pengendalian malaria

Pengendalian penyakit kusta dan frambusia

Penurunan Stunting

Penyediaan dan distribusi obat dan alkes, serta peningkatan mutu farmasi dan obat lokal

Perluasan akses pelayanan kesehatan Kaki Telanjang dan Nusantara Sehat

Penyediaan, persebaran dan peningkatan kualitas SDM kesehatan

Pemenuhan pelayanan *telemedicine* di rumah sakit

Kampanye hidup sehat, lingkungan hidup sehat dan deteksi dini penyakit

Peningkatan konsumsi pangan sehat

Penguatan sistem informasi, manajemen, mitra kesehatan nasional

PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

Kegiatan Prioritas

Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wilayah Adat

Proyek Prioritas

Peningkatan produksi kopi dan coklat

Pengolahan buah merah

Peningkatan hasil perikanan tangkap dan budidaya rumput laut di WA Bomberay dan Geami

Budidaya pala di Papua Barat

Pengembangn produk turunan sagu, keladi, betatas, dan pisang

Pendampingan dan pengiriman tenaga sukarelawan (penyuluh)

Pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan keluarga untuk ibu rumah tangga

Pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan ikan di Biak dan perumahan nelayan

Pembangunan Desa Mandiri Benih dan Penanganan Gangguan terhadap Sektor Unggulan

Fasilitasi pasar mama-mama dan Pengendalian Harga Industri Lokal

Pemberdayaan dan Pendampingan Petani/ Nelayan Lokal

Aktivasi pelabuhan pelelangan ikan omor di Kabupaten Asmat dan peran investor untuk menggerakkan industri perikanan lokal

Kegiatan Prioritas

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Proyek Prioritas

Pembangunan honai sehat dan hunian layak

Pembangunan infrastruktur air minum (spam perkotaan, pedesaan dan kawasan khusus, penampung air hujan, embung) dan sanitasi (IPAL) terintegrasi

Pembangunan TPA

Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi

Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah

Peningkatan elektrifikasi:, pembangunan PLTMG, PLTM, PLTU, PLTS (tersebar), PLTM (tersebar), PLTBM (tersebar), PLTD (tersebar)

Pembangunan depo Pertamina hingga pelosok dan APMS (agen penyalur minyak dan solar di daerah terisolir)

Irigasi Pertanian

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Konektivitas Wilayah

Proyek Prioritas

Penyelesaian Pembangunan dan Ruas Jalan Trans Papua & Jalan Prioritas dan Strategis

Penyiapan Pusat Logistik

Pembangunan dan Fungsionalisasi Pelabuhan Umum dan Bandara

Pengembangan Layanan Angkutan Udara, Laut Perintis, dan Sungai

Normalisasi Sungai

Penguatan Kuantitas dan Kualitas SDM Perhubungan Udara dan Laut

Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api

Peningkatan Akses Informasi

Kegiatan Prioritas

Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan, Pengembangan Industri Lokal & Strategis (KEK Sorong & KSEP Merauke) dan Pariwisata

Proyek Prioritas

Penyediaan lahan dan penataan ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar serta Fasilitas Umum

Ketersediaan Bahan Baku Industri

Kegiatan Prioritas

Perlindungan Sosial

Proyek Prioritas

Bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Perluasan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Integrasi KIS dan Kartu Papua Sehat (KPS)

Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran

Pemenuhan kebutuhan dasar

Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi

Kegiatan Prioritas

Penataan Kelembagaan & Regulasi, dan Tanah Ulayat

Kebijakan afirmasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur di wilayah Papua dan Papua Barat

Peningkatan kapasitas ASN melalui diklat perencanaan dan penganggaran kontekstual Papua

Penguatan Pengawasan kinerja dan disiplin ASN

Peningkatan pengawasan BPKP dan KPK dalam pelaksanaan pembangunan

Pemetaan tanah ulayat

Diskresi terhadap pemberlakuan ketentuan standarisasi Guru dan tenaga kesehatan untuk wilayah Papua

Fasilitasi penyelesaian perdasu dan perdasus

Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

Pendidikan Politik

Penguatan dan pemberdayaan forum – forum dialog kewaspadaan

Membangun pos pengaman dan sabuk pengaman perbatasan

Menyelesaikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dan pelanggaran HAM

Mencegah peredaran narkoba dan miras

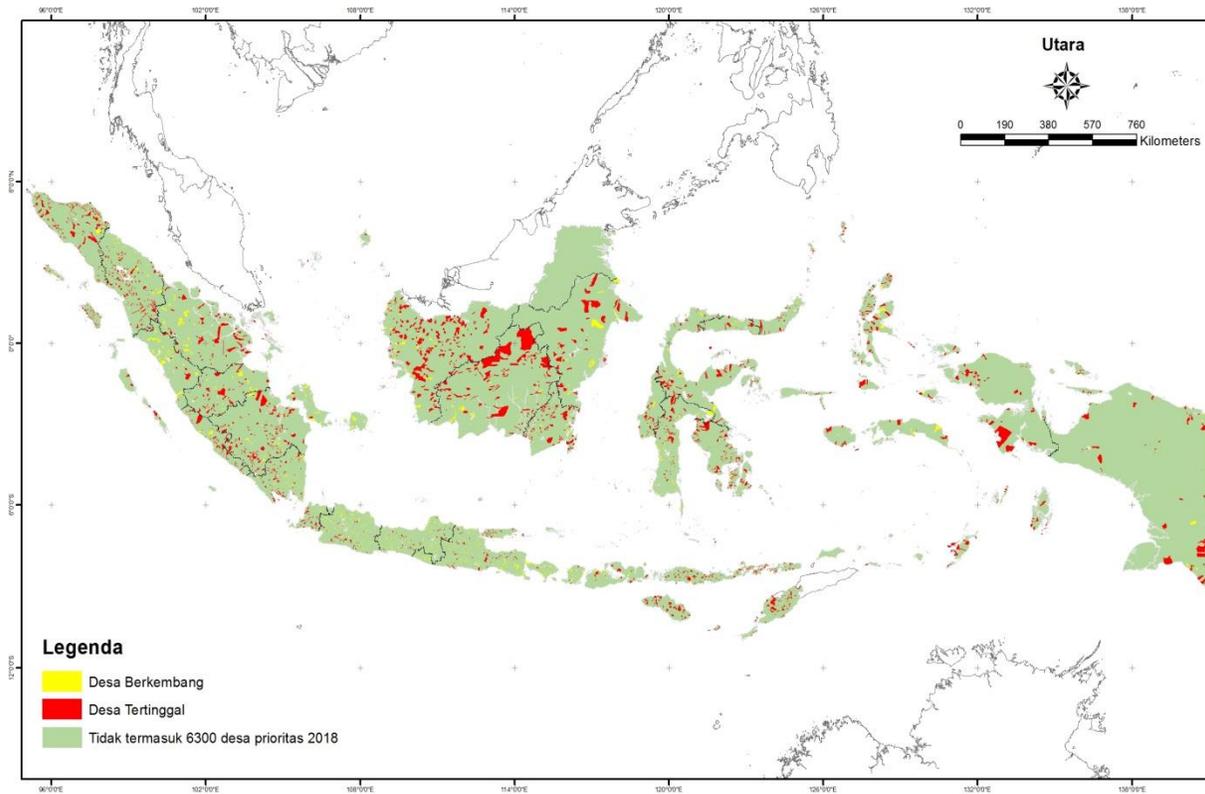
Membangun pos pengaman dan sabuk pengaman perbatasan

Melaksanakan program bela negara

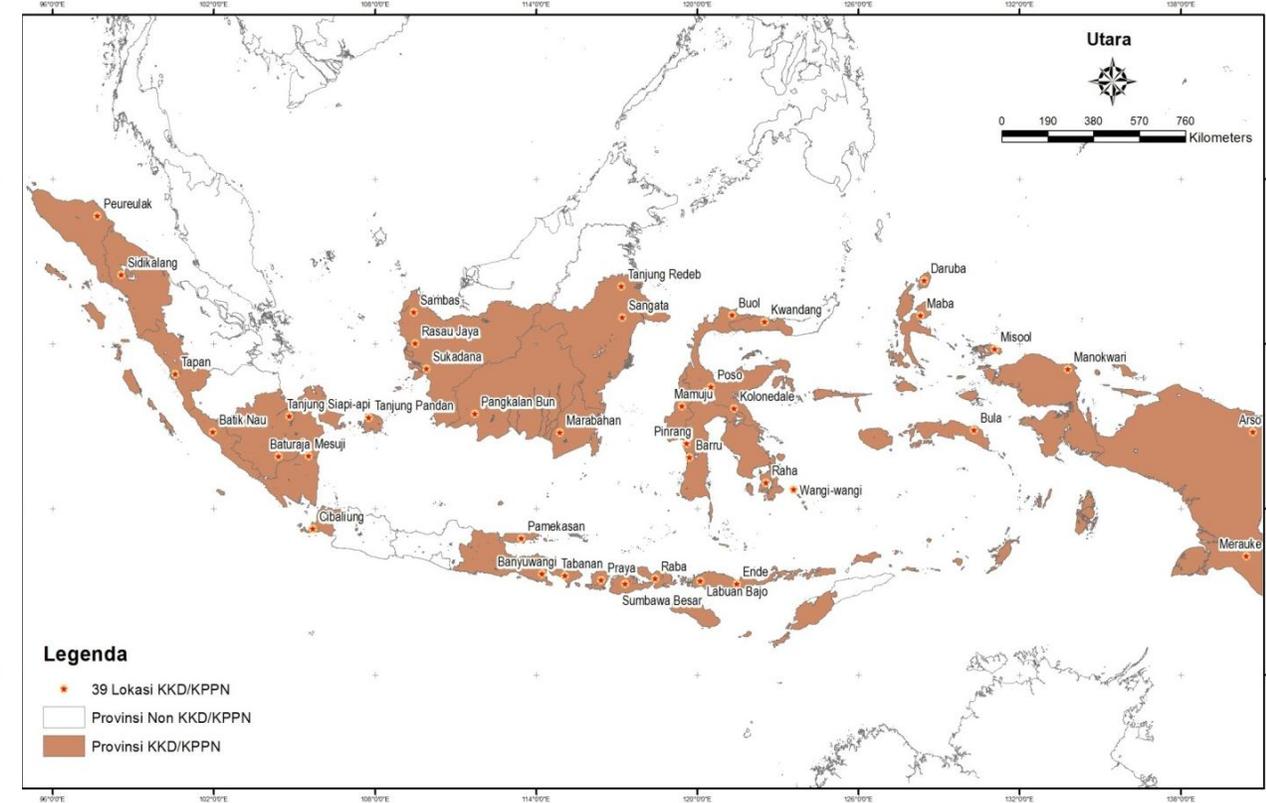
SEBARAN LOKASI PRIORITAS PER WILAYAH PULAU

Wilayah Kepulauan	Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran dalam Buku III RPJMN 2015 - 2019						
	Target Pengentasan Daerah Tertinggal (kabupaten)	Target Penanganan Wilayah Perbatasan (kab/kota)	Target Penanganan Pembangunan Perdesaan			Target Wilayah Rawan Bencana (kab/kota)	Target Reforma Agraria
			Target Pengentasan Desa Tertinggal	Target Desa Berkembang Menjadi Mandiri	Target Pembangunan Kawasan Perdesaan		
Papua	9	6	280	33	4	10	
Maluku	11	4	351	43	3	12	
Nusa Tenggara	20	7	460	47	9	15	
Sulawesi	14	2	723	173	7	24	
Kalimantan	9	9	707	146	4	18	
Sumatera	11	13	1.229	416	4	21	
Jawa	6	-	360	1.115	8	36	
Nasional	80	41	5.000	2.000	39	136	

Peta Lokasi Prioritas 4.500 Desa Tertinggal dan 1.800 Desa Berkembang Tahun 2018



Peta 39 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)



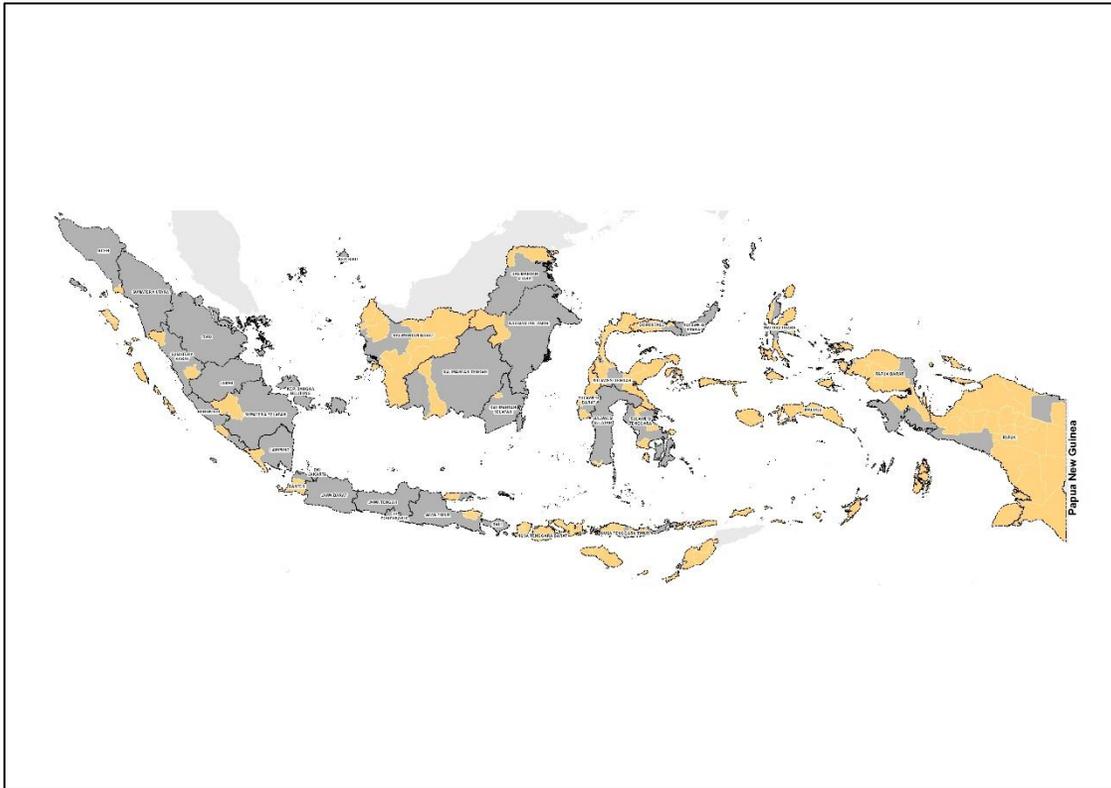
LOKASI PEMBANGUNAN PERDESAAN 2018 (1)

	Provinsi	Desa Tertinggal	Desa Berkembang	Desa di lokasi			
				KKD/KPPN	Daerah Tertinggal	Perbatasan	Rawan Bencana
1	ACEH	837	56	10	12	0	9
2	BENGKULU	113	18	12	19	0	22
3	JAMBI	69	22	0	0	0	29
4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6	22	9	0	0	0
5	KEPULAUAN RIAU	30	1	0	0	0	0
6	LAMPUNG	148	58	10	29	0	57
7	RIAU	110	36	0	0	0	0
8	SUMATERA BARAT	24	61	11	9	0	10
9	SUMATERA SELATAN	287	42	19	15	0	84
10	SUMATERA UTARA	427	63	2	81	0	81
11	KALIMANTAN BARAT	198	41	27	176	97	127
12	KALIMANTAN SELATAN	170	31	10	34	0	62
13	KALIMANTAN TENGAH	145	19	12	9	0	21
14	KALIMANTAN TIMUR	54	22	11	5	5	11
15	KALIMANTAN UTARA	37	2	0	17	17	17
16	BANTEN	62	40	3	61	0	22
17	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0	35	0	0	0	5
18	JAWA BARAT	53	301	0	0	0	148
19	JAWA TENGAH	77	321	0	0	0	67
20	JAWA TIMUR	126	320	10	57	0	171
21	BALI	2	59	7	0	0	39

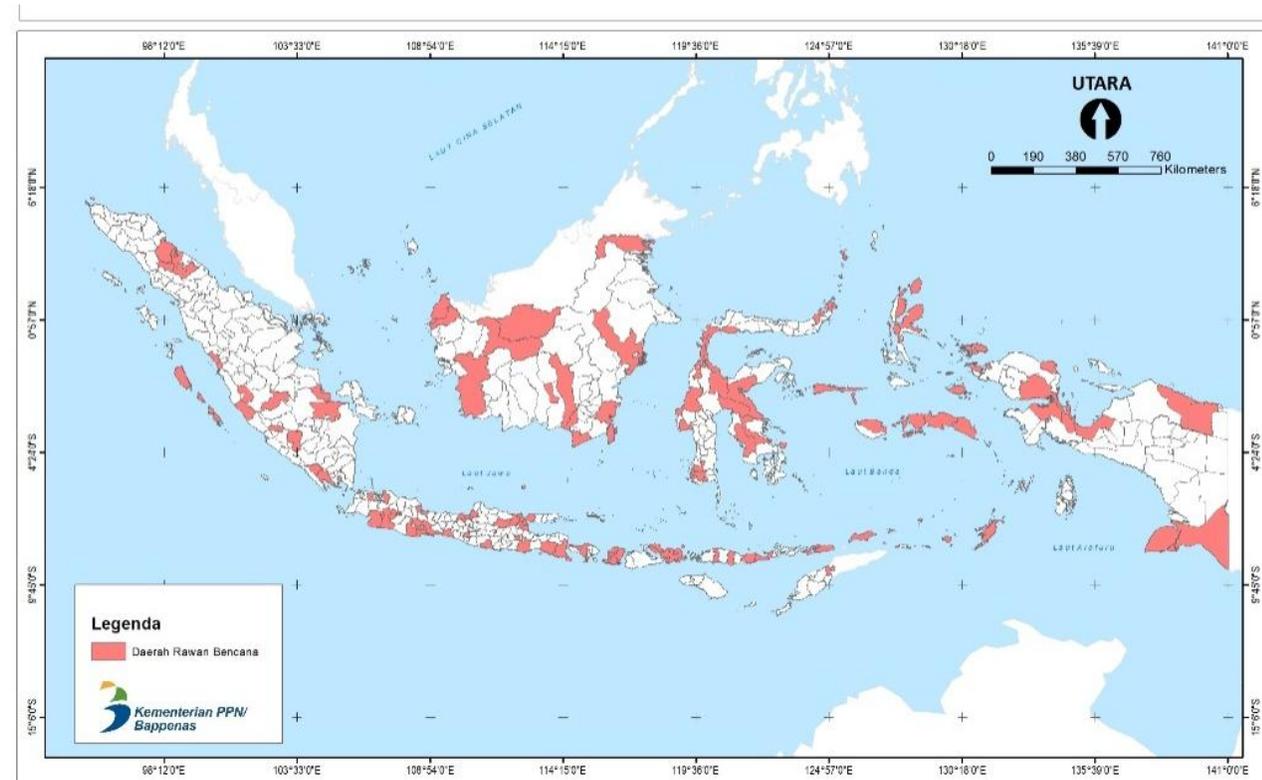
LOKASI PEMBANGUNAN PERDESAAN 2018 (2)

Provinsi	Desa Tertinggal	Desa Berkembang	Desa di lokasi			
			KKD/KPPN	Daerah Tertinggal	Perbatasan	Rawan Bencana
22 GORONTALO	47	18	10	32	0	0
23 SULAWESI BARAT	56	6	11	18	0	31
24 SULAWESI SELATAN	86	70	18	5	0	22
25 SULAWESI TENGAH	158	23	8	113	0	71
26 SULAWESI TENGGARA	210	11	11	36	0	23
27 SULAWESI UTARA	113	9	0	0	0	39
28 MALUKU	103	14	6	104	35	80
29 MALUKU UTARA	131	13	13	100	21	86
30 NUSA TENGGARA BARAT	22	42	26	64	0	47
31 NUSA TENGGARA TIMUR	386	3	3	328	119	91
32 P A P U A	137	15	12	121	37	43
33 PAPUA BARAT	76	6	8	53	10	26
Total	4.500	1.800	279	1.498	341	1.541

Lokasi 122 Kabupaten Tertinggal Tahun 2015-2019



Lokasi Prioritas 136 Kabupaten/Kota Pusat Pertumbuhan Rawan Bencana Tahun 2015 - 2019



LOKASI DAERAH TERTINGGAL (1)

No	Wilayah	Provinsi	Kabupaten	Desa Tertinggal	Prioritas 2018	Pilot Terintegrasi 2018
1	Sumatera	ACEH	Aceh Singkil	11	V	
2	Sumatera	SUMATERA UTARA	Nias	20		
3	Sumatera	SUMATERA UTARA	Nias Selatan	40		
4	Sumatera	SUMATERA UTARA	Nias Utara	10		
5	Sumatera	SUMATERA UTARA	Nias Barat	13	V	
6	Sumatera	SUMATERA BARAT	Kepulauan Mentawai	20	V	
7	Sumatera	SUMATERA BARAT	Solok Selatan	2		
8	Sumatera	SUMATERA BARAT	Pasaman Barat	0		
9	Sumatera	SUMATERA SELATAN	Musi Rawas	7	V	
10	Sumatera	SUMATERA SELATAN	Musi Rawas Utara	6	V	
11	Sumatera	BENGKULU	Seluma	21	V	
12	Sumatera	LAMPUNG	Lampung Barat	14		
13	Sumatera	LAMPUNG	Pesisir Barat	14		
14	Jawa	JAWA TIMUR	Bondowoso	11		
15	Jawa	JAWA TIMUR	Situbondo	3		
16	Jawa	JAWA TIMUR	Bangkalan	38		
17	Jawa	JAWA TIMUR	Sampang	11	V	
18	Jawa	BANTEN	Pandeglang	43		
19	Jawa	BANTEN	Lebak	25		
20	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Barat	1		
21	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Tengah	3		
22	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Timur	3	V	V
23	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	5		
24	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Dompu	5		
25	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Bima	12	V	
26	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa Barat	1		
27	Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Utara	0	V	
28	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Sumba Barat	10	V	
29	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Sumba Timur	18	V	
30	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Kupang	18	V	
31	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Timor Tengah Selatan	27	V	

No	Wilayah	Provinsi	Kabupaten	Desa Tertinggal	Prioritas 2018	Pilot Terintegrasi 2018
32	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Timor Tengah Utara	26	V	
33	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Belu	11	V	
34	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Alor	24		
35	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Lembata	60	V	
36	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Ende	34	V	
37	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Manggarai	13	V	
38	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Rote Ndao	9	V	
39	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Manggarai Barat	17	V	
40	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Sumba Tengah	13	V	
41	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Sumba Barat Daya	15	V	
42	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Nagekeo	13	V	
43	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Manggarai Timur	25	V	
44	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Sabu Raijua	16	V	V
45	Nusra	NUSA TENGGARA TIMUR	Malaka	20	V	
46	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Sambas	17		
47	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Bengkayang	10		
48	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Landak	30	V	
49	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Ketapang	27		
50	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Sintang	101		
51	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Kapuas Hulu	29		
52	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Melawi	19		
53	Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	Kayong Utara	4		
54	Kalimantan	KALIMANTAN TENGAH	Seruyan	10		
55	Kalimantan	KALIMANTAN SELATAN	Hulu Sungai Utara	33	V	
56	Kalimantan	KALIMANTAN TIMUR	Mahakam hUlu	5		
57	Kalimantan	KALIMANTAN UTARA	Nunukan	18		
58	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Banggai Kepulauan	17	V	
59	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Donggala	4		
60	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Toli-toli	6		
61	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Buol	6	V	
62	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	16		

LOKASI DAERAH TERTINGGAL (2)

No	Wilayah	Provinsi	Kabupaten	Desa Tertinggal	Prioritas 2018	Pilot Terintegrasi 2018
63	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Tojo Una-una	14	V	
64	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Sigi	15	V	
65	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Banggai Laut	12	V	
66	Sulawesi	SULAWESI TENGAH	Morowali Utara	13		
67	Sulawesi	SULAWESI SELATAN	Jeneponto	0		
68	Sulawesi	SULAWESI TENGGARA	Konawe	19	V	
69	Sulawesi	SULAWESI TENGGARA	Bombana	16	V	
70	Sulawesi	SULAWESI TENGGARA	Konawe Kepulauan	3	V	
71	Sulawesi	GORONTALO	Boalemo	5	V	
72	Sulawesi	GORONTALO	Pohuwato	1	V	
73	Sulawesi	GORONTALO	Gorontalo Utara	19	V	
74	Sulawesi	SULAWESI BARAT	Polewali Mandar	6		
75	Sulawesi	SULAWESI BARAT	Mamuju Tengah	10		
76	Maluku	MALUKU	Maluku Tenggara Barat	29	V	
77	Maluku	MALUKU	Maluku Tengah	25	V	
78	Maluku	MALUKU	Buru	11		
79	Maluku	MALUKU	Kepulauan Aru	80		
80	Maluku	MALUKU	Seram Bagian Barat	11		
81	Maluku	MALUKU	Seram Bagian Timur	13	V	
82	Maluku	MALUKU	Maluku Barat Daya	27	V	V
83	Maluku	MALUKU	Buru Selatan	9		
84	Maluku	MALUKU UTARA	Halmahera Barat	22	V	
85	Maluku	MALUKU UTARA	Kepulauan Sula	10	V	
86	Maluku	MALUKU UTARA	Halmahera Selatan	26		
87	Maluku	MALUKU UTARA	Halmahera Timur	14	V	
88	Maluku	MALUKU UTARA	Pulau Morotai	14	V	V
89	Maluku	MALUKU UTARA	Pulau Taliabu	5	V	
90	Papua	PAPUA BARAT	Teluk Wondama	6	V	
91	Papua	PAPUA BARAT	Teluk Bintuni	4	V	
92	Papua	PAPUA BARAT	Sorong Selatan	12	V	

No	Wilayah	Provinsi	Kabupaten	Desa Tertinggal	Prioritas 2018	Pilot Terintegrasi 2018
93	Papua	PAPUA BARAT	Sorong	13	V	
94	Papua	PAPUA BARAT	Raja Ampat	17	V	
95	Papua	PAPUA BARAT	Tambrau	6	V	
96	Papua	PAPUA BARAT	Maybrat	8	V	
97	Papua	PAPUA	Merauke	20	V	
98	Papua	PAPUA	Jayawijaya	17	V	
99	Papua	PAPUA	Nabire	#N/A	V	
100	Papua	PAPUA	Kepulauan Yapen	12	V	
101	Papua	PAPUA	Biak Numfor	23	V	
102	Papua	PAPUA	Paniai	5	V	
103	Papua	PAPUA	Puncak Jaya	#N/A	V	
104	Papua	PAPUA	Boven Digoel	2	V	
105	Papua	PAPUA	Mappi	5	V	
106	Papua	PAPUA	Asmat	2	V	
107	Papua	PAPUA	Yahukimo	8	V	
108	Papua	PAPUA	Pegunungan Bintang	7	V	
109	Papua	PAPUA	Tolikara	14	V	
110	Papua	PAPUA	Sarmi	2	V	V
111	Papua	PAPUA	Keerom	3	V	
112	Papua	PAPUA	Waropen	18	V	
113	Papua	PAPUA	Supiori	1	V	
114	Papua	PAPUA	Mamberamo Raya	3	V	
115	Papua	PAPUA	Nduga	2	V	
116	Papua	PAPUA	Lanny Jaya	2	V	
117	Papua	PAPUA	Mamberamo Tengah	2	V	
118	Papua	PAPUA	Yalimo	1	V	
119	Papua	PAPUA	Puncak	#N/A	V	
120	Papua	PAPUA	Dogiyai	2	V	
121	Papua	PAPUA	Intan Jaya	#N/A	V	
122	Papua	PAPUA	Deiyai	2	V	

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH

Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan

Sumatera	Aceh	Aceh Besar					
	Sumatera Utara	Serdang Bedagai					
	Riau	Rokan Hilir	Kota Dumai	Bengkalis	Kep. Meranti	Pelalawan	Indragiri Hilir
	Kepri	Karimun	Bintan	Batam	Anambas	Natuna	
Kalimantan	Kalbar	Sambas	Bengkayang	Sanggau	Sintang	Kapuas Hulu	
	Kaltim	Mahakam Hulu	Berau				
	Kaltara	Malinau	Nunukan				
Sulawesi	Sulawesi Utara	Sangihe	Talau				
NTT	Sabu Raijua	Rote Ndao	Alor	Kupang	Malaka	Belu	TTU
Maluku	Maluku	MBD	MTB	Kep. Aru			
	Maluku Utara	Morotai					
Papua	Papua	Merauke	Supiori	Pegunungan Bintang	Keerom	Boven Digul	
	Papua Barat	Raja Ampat					

Legenda :

0 % Lokpri
Ditangani

≤ 50 % Lokpri
Ditangani

≥ 50 % Lokpri
Ditangani

≥ 75 % Lokpri
Ditangani

100 % Lokpri
Ditangani

LOKASI KAWASAN PERBATASAN

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Prioritas *	Jumlah PKSN
Aceh	Kota Sabang	1	1
Sumatera Utara	Serdang Bedagai	1	
Riau	Rokan Hilir	3	1
	Kep. Meranti	6	
	Bengkalis	5	
	Indragiri Hilir	2	
	Kota Dumai	5	
	Pelalawan	1	
Kepulauan Riau	Kota Batam	9	2
	Bintan	5	
	Natuna	10	
	Kep. Anambas	7	
	Karimun	10	
Kalimantan Barat	Sambas	1	5
	Bengkayang	2	
	Sanggau	1	
	Sintang	2	
	Kapuas Hulu	5	
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	2	1
	Berau	1	
Kalimantan Utara	Nunukan	10	4
	Malinau	5	

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Prioritas *	Jumlah PKSN
Nusa Tenggara Timur	TTU	7	3
	Kupang	1	
	Belu	7	
	Malaka	5	
	Rote Ndao	3	
	Alor	7	
	Sabu Raijua	1	
Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	5	2
	Kepulauan Talaud	3	
Maluku	MBD	10	3
	MTB	6	
	Kep. Aru	3	
Maluku Utara	Morotai	5	1
Papua	Supiori	4	3
	Keerom	5	
	Peg. Bintang	8	
	Boven Digoel	7	
	Merauke	5	
Papua Barat	Raja Ampat	2	
Jumlah	41 Kabupaten/Kota	187 Lokpri	26 PKSN

* Rincian nama Lokpri sesuai dengan Rencana Induk Perbatasan Tahun 2015-2019

LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA 2015 - 2019 (1)

No	Wilayah Pulau	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Indeks Risiko	Tingkat Risiko
1	PAPUA	PAPUA	Kota Jayapura	203.2	TINGGI
2	PAPUA	PAPUA	Merauke	170	TINGGI
3	PAPUA	PAPUA	Sarmi	171.6	TINGGI
4	PAPUA	PAPUA	Kepulauan Yapen	117.2	SEDANG
5	PAPUA	PAPUA BARAT	Kota Sorong	183.2	TINGGI
6	PAPUA	PAPUA BARAT	Manokwari	204.8	TINGGI
7	PAPUA	PAPUA	Nabire	180.8	TINGGI
8	PAPUA	PAPUA BARAT	Raja Ampat	200.8	TINGGI
9	PAPUA	PAPUA BARAT	Teluk Wondama	147.2	TINGGI
10	PAPUA	PAPUA BARAT	Teluk Bintuni	166.8	TINGGI
11	MALUKU	MALUKU	Kota Ambon	156.4	TINGGI
12	MALUKU	MALUKU	Seram Bagian Barat	180.4	TINGGI
13	MALUKU	MALUKU	Seram Bagian Timur	173.2	TINGGI
14	MALUKU	MALUKU	Maluku Tengah	214	TINGGI
15	MALUKU	MALUKU	Maluku Tenggara	179.2	TINGGI
16	MALUKU	MALUKU	Buru	179.6	TINGGI
17	MALUKU	MALUKU UTARA	Kota Ternate	160.4	TINGGI
18	MALUKU	MALUKU UTARA	Pulau Morotai	166.4	TINGGI
19	MALUKU	MALUKU UTARA	Halmahera Utara	194.8	TINGGI
20	MALUKU	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	164.4	TINGGI
21	MALUKU	MALUKU UTARA	Kepulauan Sula	219.2	TINGGI
22	MALUKU	MALUKU UTARA	Halmahera Timur	173.2	TINGGI
23	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	149.2	TINGGI
24	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Barat	205.2	TINGGI
25	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Timur	180.4	TINGGI
26	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Tengah	168.4	TINGGI
27	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Utara	152.4	TINGGI
28	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	170.8	TINGGI
29	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Dompu	184.4	TINGGI
30	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	Bima	209.2	TINGGI
31	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	138	SEDANG

No	Wilayah Pulau	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Indeks Risiko	Tingkat Risiko
32	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Ngada	158.8	TINGGI
33	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Ende	186	TINGGI
34	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Sikka	200.8	TINGGI
35	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Manggarai	174.8	TINGGI
36	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Alor	183.2	TINGGI
37	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Belu	181.2	TINGGI
38	SULAWESI	GORONTALO	Gorontalo	146.4	TINGGI
39	SULAWESI	GORONTALO	Kota Gorontalo	123.2	SEDANG
40	SULAWESI	SULAWESI BARAT	Mamuju (tengah)	200.4	TINGGI
41	SULAWESI	SULAWESI BARAT	Polewali Mandar	202	TINGGI
42	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	Maros	168.4	TINGGI
43	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	Takalar	144.4	TINGGI
44	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	Gowa	163.2	TINGGI
45	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	Luwu Timur	202	TINGGI
46	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	Kota Makasar	144.4	TINGGI
47	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	Bantaeng	174.4	TINGGI
48	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	Sigi	72	SEDANG
49	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	Donggala	189.2	TINGGI
50	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	172.4	TINGGI
51	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	173.6	TINGGI
52	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	Morowali (Utara)	177.2	TINGGI
53	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	181.2	TINGGI
54	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	Kolaka	186.4	TINGGI
55	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	Konawe	173.6	TINGGI
56	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	148.4	TINGGI
57	SULAWESI	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	163.2	TINGGI
58	SULAWESI	SULAWESI UTARA	Minahasa Utara	158.4	TINGGI
59	SULAWESI	SULAWESI UTARA	Minahasa Selatan	173.6	TINGGI
60	SULAWESI	SULAWESI UTARA	Kepulauan Sangihe	154.4	TINGGI
61	SULAWESI	SULAWESI UTARA	Kota Manado	130.4	SEDANG
62	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	96.4	SEDANG
63	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	178	TINGGI
64	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Bengkayang	178	TINGGI
65	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Sambas	180.4	TINGGI

LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA 2015 - 2019 (2)

No	Wilayah Pulau	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Indeks Risiko	Tingkat Risiko
66	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Sintang	156.4	TINGGI
67	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Kapuas Hulu	163.2	TINGGI
68	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Ketapang	192.4	TINGGI
69	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Landak	131.6	SEDANG
70	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	Kotabaru	205.2	TINGGI
71	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	Barito Kuala	190	TINGGI
72	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Laut	178	TINGGI
73	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	148.4	TINGGI
74	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	Kapuas	179.2	TINGGI
75	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	134.8	SEDANG
76	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	159.2	TINGGI
77	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	Kutai Kertanegara	160.4	TINGGI
78	KALIMANTAN	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	132.4	SEDANG
79	KALIMANTAN	KALIMANTAN UTARA	Nunukan	173.2	TINGGI
80	JAWA-BALI	BALI	Kota Denpasar	167.2	TINGGI
81	JAWA-BALI	BALI	Badung	179.2	TINGGI
82	JAWA-BALI	BALI	Tabanan	174.4	TINGGI
83	JAWA-BALI	BALI	Buleleng	167.2	TINGGI
84	JAWA-BALI	BANTEN	Tangerang	200.8	TINGGI
85	JAWA-BALI	BANTEN	Cilegon	182.4	TINGGI
86	JAWA-BALI	DI YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	124.8	SEDANG
87	JAWA-BALI	DI YOGYAKARTA	Sleman	153.6	TINGGI
88	JAWA-BALI	DKI JAKARTA	DKI Jakarta	123.3	SEDANG
89	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Kota Bogor	107.2	SEDANG
90	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Kota Depok	102.4	SEDANG
91	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Bekasi	164.8	TINGGI
92	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Cianjur	250	TINGGI
93	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Kota Bandung	154	TINGGI
94	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Bandung Barat	162	TINGGI
95	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Cirebon	181.2	TINGGI
96	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Sukabumi	231.2	TINGGI
97	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Tasikmalaya	224.8	TINGGI
98	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Ciamis	215.2	TINGGI
99	JAWA-BALI	JAWA BARAT	Pangandaran	215.2	TINGGI
100	JAWA-BALI	JAWA TENGAH	Kota Semarang	183.6	TINGGI

No	Wilayah Pulau	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Indeks Risiko	Tingkat Risiko
101	JAWA-BALI	JAWA TENGAH	Kendal	167.2	TINGGI
102	JAWA-BALI	JAWA TENGAH	Demak	183.6	TINGGI
103	JAWA-BALI	JAWA TENGAH	Cilacap	215.2	TINGGI
104	JAWA-BALI	JAWA TENGAH	Kebumen	203.2	TINGGI
105	JAWA-BALI	JAWA TENGAH	Magelang	143.2	SEDANG
106	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Malang	219.2	TINGGI
107	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Gresik	175.2	TINGGI
108	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Bangkalan	164.4	TINGGI
109	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	166.8	TINGGI
110	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Sidoarjo	149.6	TINGGI
111	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Lamongan	174	TINGGI
112	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Bojonegoro	150	TINGGI
113	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Pacitan	215.2	TINGGI
114	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Banyuwangi	219.2	TINGGI
115	JAWA-BALI	JAWA TIMUR	Jember	219.2	TINGGI
116	SUMATERA	ACEH	Kota Lhokseumawe	175.2	TINGGI
117	SUMATERA	ACEH	Kota Banda Aceh	167.2	TINGGI
118	SUMATERA	BENGGULU	Kota Bengkulu	170.4	TINGGI
119	SUMATERA	BENGGULU	Mukomuko	191.2	TINGGI
120	SUMATERA	BENGGULU	Rejang Lebong	146	TINGGI
121	SUMATERA	JAMBI	Kota Jambi	128	SEDANG
122	SUMATERA	JAMBI	Sarolangun	155.2	TINGGI
123	SUMATERA	JAMBI	Kerinci	150	TINGGI
124	SUMATERA	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	182	TINGGI
125	SUMATERA	LAMPUNG	Lampung Barat	214	TINGGI
126	SUMATERA	LAMPUNG	Tanggamus	201.2	TINGGI
127	SUMATERA	SUMATERA BARAT	Kota Padang	209.2	TINGGI
128	SUMATERA	SUMATERA BARAT	Padang Pariaman	196.8	TINGGI
129	SUMATERA	SUMATERA BARAT	Kepulauan Mentawai	197.2	TINGGI
130	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	Banyuasin	156.4	TINGGI
131	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	Lahat	162	TINGGI
132	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Kota Medan	155.2	TINGGI
133	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Langkat	155.2	TINGGI
134	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Deli Serdang	155.2	TINGGI
135	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Karo	154	TINGGI
136	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Simalungun	95.2	SEDANG

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH

Lokasi Prioritas Percepatan Pembangunan Papua

Proyek Prioritas Nasional	Proyek KL	Instansi Pelaksana	Program	Kegiatan	Output	Lokasi
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di Mumugu	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas utama pelabuhan laut	Kab. Asmat
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di Nabire	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas utama pelabuhan laut	Kab. Nabire
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di Serui	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas utama pelabuhan laut	Kab. Kepulauan Yapen
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan di Depapre	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas utama pelabuhan laut	Kab. Jayapura
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik	Pengembangan Bandar Udara Sentani	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Peningkatan Kapasitas Bandar Udara	Kota Jayapura
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik	Pengembangan Bandar Udara Mopah	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Peningkatan Kapasitas Bandar Udara	Kab. Merauke
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik	Pembangunan Jalan Enarotali - Sugapa	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pembangunan Jalan	Kab. Paniai
Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik	Pembangunan Jalur KA Sorong - Manokwari (Pengadaan Lahan)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	Pengadaan Tanah	Provinsi Papua Barat
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Jalan Habema - Kenyam - Mumugu	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pembangunan Jalan	Kab. Nduga
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Jalan Dekai - Oksibil	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pembangunan Jalan	Kab. Yahukimo

TERIMA KASIH